

ABSTRAK

Implementasi kebijakan merupakan suatu proses penerapan program yang dibuat oleh pejabat pemerintah dengan sasaran dari kebijakannya adalah masyarakat. penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe. Adapun yang menjadi fenomena dalam penelitian ini adalah rendahnya tingkat partisipasi aktivasi aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Kota Lhokseumawe yang tidak sesuai dengan target kebijakan yang diatur pemerintah dalam Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2022. Berangkat dari fenomena permasalahan tersebut, kemudian yang menjadi fokus dari penelitian ini adalah, pertama melihat standar implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) dilihat dari indikator Standarisasi perangkat keras, perangkat lunak, dan Blangko KTP-el dan Standarisasi Penyelenggaraan Aplikasi Identitas Kependudukan Digital. Kedua, melihat faktor pendukung dan penghambat implementasi kebijakan aplikasi IKD yang dianalisis menggunakan grand teori Edward III yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data berupa observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun pengambilan sampel menggunakan teknik purposif dan teknik analisis data menggunakan pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan berdasarkan model interaktif Miles dan Huberman. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan aplikasi Identitas Kependudukan Digital (IKD) di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Lhokseumawe masih belum optimal. Faktor-faktor yang menjadi penghambat yaitu: (1) Ketidakstabilan jaringan internet dan sistem *server* yang kadang *error*; (2) Ketiadaan anggaran khusus untuk kegiatan operasional digitalisasi; (3) Rendahnya partisipasi masyarakat yang disebabkan oleh kurangnya literasi digital dan tidak memiliki *smartphone*; serta (4) Lemahnya koordinasi lintas instansi yang menyebabkan belum masifnya pemanfaatan IKD pada instansi lain.

Kata Kunci: Implementasi kebijakan, Identitas Kependudukan Digital (IKD)

ABSTRACT

Policy implementation is a process of applying programs created by government officials with the target audience being the community. This study aims to determine the implementation of the Digital Identity Card (IKD) policy at the Population and Civil Registration Office of Lhokseumawe City. The phenomenon in this study is the low level of participation in activating the Digital Identity Application (IKD) in Lhokseumawe City, which is not in line with the policy targets set by the government in the Ministry of Home Affairs Regulation Number 72 of 2022. Based on this phenomenon, the focus of this study is, first, to examine the implementation standards of the Digital Identity Card (IKD) application policy in terms of indicators of hardware, software, and electronic ID card blank standardization, as well as the standardization of the Digital Identity Card application implementation. Second, it examines the supporting and inhibiting factors in the implementation of the IKD application policy, analyzed using Edward III's grand theory, namely communication, resources, disposition, and bureaucratic structure. This study uses a descriptive qualitative method with data collection techniques in the form of observation, interviews, and documentation. Sampling was conducted using purposive sampling techniques, and data analysis techniques included data collection, data reduction, data presentation, and conclusion drawing based on the interactive model of Miles and Huberman. The results of this study indicate that the implementation of the Digital Identity (IKD) application policy at the Population and Civil Registration Office of Lhokseumawe City is still not optimal. The factors that hindered this implementation were: (1) unstable internet network and server system that sometimes experienced errors; (2) lack of a specific budget for digitalization operations; (3) low community participation due to a lack of digital literacy and not owning smartphones; and (4) weak inter-agency coordination, which resulted in the IKD not being widely used in other agencies.

Keywords: Policy implementation, Digital Identity (IKD)